

Dugaan Pungutan, Wakil Ketua DPRD Karawang Desak Pemkab Evaluasi Sekolah

Karawang, MIJ

DUGAAN banyaknya pihak sekolah di Kabupaten Karawang yang melakukan berbagai pungutan telah membuat para orangtua murid mengeluh. Sehingga Pemerintah menetapkan aturan tegas dan kebijakan bahwa, Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) gratis alias bebas dari berbagai pungutan biaya.

Koordinator Bidang Pendidikan yang sekaligus Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karawang Sri Rahayu Agustina, mengatakan jika permasalahan pungutan di sekolah dalam bentuk pembelian seragam, sumbangan Komputer, buku-buku LKS, dan lain sebagainya, itu memang setiap tahunnya dihadapi para orangtua murid.

"Ini kan menjadi masalah tiap tahun, di buku LKS misal, siswa dan siswi wajib beli buku LKS, padahal kan sudah ada buku paket," kata Sri saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, (18/7/2019).

Harusnya, tegas Sri, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang melakukan evaluasi terhadap pungutan-pungutan yang membebani para orang tua murid tersebut. Jangan pura-pura tidak tahu karena itu terjadi setiap tahunnya.



"Evaluasi saja sekolah negeri mana yang masih melakukan pungutan-pungutan itu, untuk apa ada BOS jika masih banyak pungutan, kalau siswa sekadar harus beli baju seragam seperti batik atau kaos olahraga, menu-



rut saya itu hal wajar asal tidak komersil dan jadi ajang bisnis," tegas Sri.

Dinas Pendidikan harus terus fokus ke dunia pendidikan baik infrastruktur maupun kualitas guru. Seperti di Surabaya pendi-

dikan berbasis keluarga bisa diterapkan di sana. "Maka itu suruh belajar ke Surabaya, agar pendidikan berbasis keluarga diterapkan juga di Karawang," tandasnya.

(Her/*)

